

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 31 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Sedangkan atas 87 LKKL, BPK memberikan opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN;
2. Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI;
3. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut.

Ringkasan dan Telaahan terhadap LKPP Tahun 2017 ini memuat hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta lampiran temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Komisi DPR RI. Selain itu, Ringkasan dan

Telaahan ini juga disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan BAKN DPR RI dalam memahami temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Auditorat Keuangan BPK RI berdiskusi guna memperdalam temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan sebagai bahan BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Ringkasan dan Telaahan ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Juli 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
Infografis.....	v
Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.A. 2017 Terhadap Sistem Pengendalian Intern.....	1
1 Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
2 Pendapatan.....	3
3 Belanja.....	12
4 Pembiayaan.....	17
5 Aset.....	18
Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.A. 2017 pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	36
1 Pendapatan.....	37
2 Belanja.....	40
Lampiran.....	49
Lampiran 1.1.1 Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2017 pada K/L.....	50
Lampiran 1.1.2 Rekapitulasi PNBPN Belum Disetor Tahun 2017 pada K/L.....	52
Lampiran 1.1.3 Rekapitulasi PNBPN kurang pungut Tahun 2017 pada K/L.....	54
Lampiran 1.1.4 Rekapitulasi PNBPN Tidak Dipungut Tahun 2017 pada K/L.....	56
Lampiran 1.1.5 Rekapitulasi Pungutan PNBPN Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017.....	58
Lampiran 1.1.6 Rekapitulasi Pungutan PNBPN memiliki dasar hukum dan digunakan langsung Tahun 2017 pada K/L.....	60
Lampiran 1.1.7 Kekurangan Pembayaran PNBPN.....	61
Lampiran 1.1.8 Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan.....	63

Lampiran 1.1.9 Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNB	65
Lampiran 1.1.10 Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Piutang	70
Lampiran 2.1.1 Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal pada Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal	74
Lampiran 2.1.2 Rekapitulasi Permasalahan dalam Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang	79
Lampiran 2.1.3 Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak	87
Lampiran 2.1.4 Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak	96
Lampiran 2.1.5 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	106
Lampiran 2.1.6 Rekapitulasi Permasalahan dalam Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas	108
Lampiran 2.1.7 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Modal Terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	111
Lampiran 2.1.8 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Barang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan	121
Lampiran 2.1.9 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Pegawai Terkait Peraturan Perundang-undangan	139
Lampiran 2.1.10 Rekapitulasi Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos	143
Lampiran 2.1.11 Rekapitulasi Permasalahan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjalanan Dinas dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan	144

LKPP 2017



Opini

TA	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				Jumlah Entitas
		WTP	WDP	TMP	TW	
2017	WTP	80	6	2	-	88
2016	WTP	74	8	6	-	88
2015	WDP	56	26	4	-	86

Laporan Realisasi Anggaran

(dalam triliun rupiah)

Pendapatan Negara

TA	Penerimaan Perpajakan	PNBP	Penerimaan Hibah
TA 2017	1.343,52	311,21	11,62
TA 2016	1.284,97	261,97	8,98

Belanja Negara

TA	Belanja Pemerintah Pusat	Transfer ke Daerah				Dana Desa
		Dana Perimbangan	Dana Insentif Daerah	Dana Keistimewaan DIY	Dana Otsus	
TA 2017	1.265,35	654,48	7,50	0,80	19,44	59,76
TA 2016	1.154,01	639,76	5,00	0,54	18,26	46,67

Peraca

	Aset	Kewajiban	Ekuitas
31 Des 2017	5.947,83	4.407,05	1.540,78
31 Des 2016	5.456,88	3.889,94	1.566,93

TEMUAN LKPP 2017



Temuan

Sistem Pengendalian Intern

13

Temuan

Permasalahan

48

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

5

Temuan

Permasalahan

22

Nilai Temuan



Rp26.538.642.944.095,20

USD13.152.165,19

EUR2.257.530,70

GBP1.986.042,34

LKKL yang Menjadi Perhatian dalam LKPP 2017



LKKL memperoleh Opini
WDP dan TMP

- Kementerian Pertahanan (WDP)**
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (WDP)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (TMP)*
- LPP Radio Republik Indonesia (WDP)**
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (WDP)
- Badan Keamanan Laut (TMP)*
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (WDP)
- LPP Televisi Republik Indonesia (WDP)

*LKKL yang mendapat opini TMP dua tahun berturut-turut (TA 2016 & 2017)

**LKKL yang mendapat opini WDP dua tahun berturut-turut (TA 2016 & 2017)

Permasalahan & Nilai Temuan

(dalam milyar rupiah)

Kementerian Pertahanan	PNBP	Belanja Modal	10.716,79
	Piutang Bukan Pajak	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang	Belanja Perjadin	
Kementerian Kelautan dan Perikanan	PNBP	Belanja Modal	396,98
	Piutang Bukan Pajak		
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Belanja Barang		0,069
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Belanja Barang		4,23
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Belanja Modal	Belanja Perjadin	761,02
	Belanja Modal		
LPP Radio Republik Indonesia	PNBP	Belanja Modal	25,10
	Piutang Bukan Pajak	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang	Belanja Perjadin	
Badan Keamanan Laut	Belanja Modal	Belanja Pegawai	252,54
	Belanja Barang	Belanja Perjadin	
LPP Televisi Republik Indonesia	PNBP	Belanja Modal	37,66
	Piutang Bukan Pajak	Belanja Perjadin	
	Belanja Barang		